

MENGUNGKAP MINAT DAN PERILAKU AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KELOMPOK SADAR WISATA TUNJUNG MEKAR (Studi Kasus Pada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)

¹Desak Putu Pratiwi, ¹Made Aristia Prayudi, ²Made Arie Wahyuni

Program Studi Akuntansi S1
Jurusan Akuntansi Program S1
Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: desak_pratiwi@yahoo.com, prayudi.acc@undiksha.ac.id,
ariewahyuni@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, (2) Alasan tidak dilaporkannya pengelolaan keuangan oleh Kelompok Aling-Aling kepada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, serta (3) Pemahaman Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan Kelompok Aling-Aling mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dapat dikatakan transparan dan akuntabel (2) Alasan tidak melaporkan pengelolaan keuangan oleh Kelompok Aling-Aling dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dimana ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi niat untuk mewujudkan perilaku akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan (3) Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan Kelompok Aling-Aling memiliki pemahaman bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sangatlah penting dalam menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat atas pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Sambangan.

Kata kunci : Minat dan Perilaku, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan

Abstract

This study aimed at (1) Determining the process of financial management accountability in Tunjung Mekar Tourism Awareness Group, (2) The reasons for Aling-Aling Group not reporting the financial management to Tunjung Mekar Tourism Awareness Group, and (3) The understanding of Tunjung Mekar Tourism Awareness Groups and Aling-Aling group regarding the importance of financial management transparency and accountability. This type of research was a qualitative research. The data collection methods used were interviews, observations, and documentation studies. The results of this study revealed that (1) The process of financial management carried out by Tunjung Mekar Tourism Awareness Group could be said transparent and accountable (2) The reasons for not reporting the financial management by Aling-Aling Group were influenced by three factors, namely attitudes, subjective norms, and behavioral controls, in which all these three factors could influence the intention to realize financial management accountability and transparency behaviors (3) Tunjung Mekar Tourism Awareness Group and Aling-Aling

Group understood that financial management accountability and transparency were very important in maintaining members' and community's trust on the management of tourist attractions in Sambangan Village.

Keywords: *Interest and Behavior, Transparency, Accountability, Financial Management*

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki keindahan alam yang dikagumi oleh banyak wisatawan bahkan sampai ke mancanegara. Keindahan alam disetiap daerah menjadi salah satu potensi kawasan wisata untuk menarik wisatawan baik domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Berdasarkan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan pariwisata nasional perlu mengoptimalkan dukungan, peran serta, dan partisipasi dari masyarakat melalui kegiatan sadar wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah sebuah kelompok penggerak pariwisata yang berbentuk lembaga informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya (Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata, 2012). Kelompok Sadar Wisata merupakan organisasi yang bersifat sosial dapat dikatakan tidak mengelola aset, tetapi lebih kepada mengusahakan peningkatan kualitas suatu pelayanan wisata dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar daerah kawasan wisata. Dalam rangka menjalankan organisasinya Pokdarwis mengelola dana agar program-program yang ada dalam kelompok dapat terealisasi.

Agar dapat berjalan dengan baik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat Kelompok Sadar Wisata hendaknya memenuhi standar pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap organisasi sehingga tidak

meresahkan dan menimbulkan kecurigaan baik antara pengurus dan masyarakat. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2010). Atmadja, dkk (2013:19) juga mengatakan, transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pengelolaan keuangan pada suatu organisasi atau kelompok harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik pihak eksternal dan internal. Bastian (2006:385) memaknai akuntabilitas sebagai suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau keberwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Peneliti melakukan perbandingan ke 10 Kelompok Sadar Wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Dari 10 Kelompok Sadar Wisata ada 8 Kelompok Sadar Wisata yang tidak mengelola keuangan secara langsung dan 2 Kelompok Sadar Wisata yang mengelola keuangan. Kedelapan Kelompok Sadar Wisata tersebut berada di Desa Gitgit, Desa Les, Desa Kaliasem, Desa Kalibukbuk, Desa Sudaji, Desa Bukti, Desa Panuktukan, dan Desa Menyali. Sedangkan Kelompok Sadar Wisata yang dimiliki oleh Desa Ambengan dan Desa Sambangan berbeda dengan kedelapan Kelompok Sadar Wisata yang sudah disebutkan, dimana kedua Kelompok Sadar Wisata tersebut mengelola keuangan secara langsung atas objek wisata yang ada. Kelompok Sadar Wisata di Desa Ambengan membagi anggota kelompok ke dalam beberapa sub unit, masing-masing unit mencatat mulai dari pengeluaran,

pendapatan, serta sisanya menjadi pendapatan bagi anggota kelompok yang diperoleh setiap bulannya. Jadi, setiap bulan masing-masing kelompok yang mengelola objek wisata Blue Lagoon dan Air Terjun Jembong mencatat berapa pemasukan, pengeluaran, serta pembagian hasil kepada masing-masing anggota. Diakhir bulan masing-masing kelompok akan melaporkan pengelolaan keuangan mereka kepada Ketua Kelompok Sadar Wisata.

Sistem pengelolaan keuangan di Kelompok Sadar Wisata di Desa Sambangan berbeda dari Kelompok Sadar Wisata Desa Ambengan. Pengelolaan keuangan secara keseluruhan dari mulai pencatatan pemasukan, pengeluaran, pembagian hasil, serta lainnya dikelola sendiri oleh Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan tidak dikelola oleh masing-masing kelompok yang ada di objek wisata di Desa Sambangan seperti yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata yang ada di Desa Ambengan. Diakhir bulan, Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar akan mengkontribusikan pembagian hasil kepada kelompok yang bernaung dibawahnya, yaitu kelompok Aling-Aling. Namun, yang menarik perhatian peneliti adalah salah satu kelompok yang bernaung di bawah Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, yaitu kelompok Aling-Aling tidak melaporkan pengelolaan keuangannya pada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar. Padahal Pokdawis Tunjung Mekar harus membuat laporan pertanggungjawaban di akhir tahun secara lengkap yang di dalamnya juga termasuk dana yang telah dikontribusikan kepada kelompok Aling-Aling digunakan untuk apa saja.

Adanya perilaku untuk tidak melaporkan pengelolaan keuangan pada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar berdampak pada tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan pada kelompok tersebut. Padahal berdasarkan pengamatan peneliti pendapatan yang diperoleh dari kelompok Aling-Aling adalah 40% dari total pendapatan kunjungan masuk perbulannya. Pada tahun 2017 pendapatan yang diperoleh oleh kelompok Aling-Aling tercatat sebesar Rp. 131.762.000,-. Dana yang dikelola cukup besar jika tidak disertai pengelolaan keuangan yang transparan dan

akuntabel maka akan timbul masalah seperti kecurigaan pada sesama anggota kelompok Darwis. Selain itu munculnya opini di kalangan anggota kelompok terkait penyelewengan keuangan yang dilakukan bisa mengakibatkan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”, Pemerintahan desa yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Dalam teori perilaku beralasan atau dikenal dengan *Theory Planned of Behaviour*, minat atau niat ditentukan oleh 3 faktor yaitu; tingkat dimana seorang individu merasa baik atau kurang baik (*attitudes*); pengaruh sosial yang mempengaruhi individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (*subjective norms*); dan perasaan mudah atau sulit dalam melakukan suatu perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa. Norma subjektif merupakan keyakinan normatif yang berkaitan dengan persepsi individu tentang bagaimana kelompok melihat perilaku dan evaluasi yang pada umumnya diekspresikan sebagai motivasi individu untuk mematuhi kelompok-kelompok rujukan. Persepsi kontrol perilaku individu menunjukkan kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Menurut penelitian oleh Sulistiani (2017) yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia di Dadia Prebali, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng”, Dengan tidak dibuatnya laporan keuangan secara lengkap namun pencatatan keuangan masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana, tentu saja menyebabkan transparan dan pertanggungjawaban

pengelolaan dana punia di dadia tersebut perlu dipertanyakan. Dengan menggunakan pencatatan yang tergolong sederhana memungkinkan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan penyelewengan baik sengaja atau tidak sengaja dalam pengelolaan dana punia ini yang sebagian besar dana berasal dari masyarakat setempat.

Pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai serta mudah dimengerti. Keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan harus dilakukan Kelompok Sadar Wisata dan kelompok Aling-Aling mengingat kelompok tersebut terbentuk atas kesadaran dan saling percaya untuk membangun daerah kawasan wisata yang ada di Desa Sambangan. Apabila kepercayaan dalam kelompok berkurang akibat dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan maka akan berdampak pada keberlanjutan kelompok tersebut. Mengingat pelaporan pengelolaan yang dilakukan oleh Kelompok Aling-Aling tidak lengkap dan sistem pencatatan yang dilakukan masih tergolong sederhana dapat mengakibatkan kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Tetapi, pada kenyataannya Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar sampai sekarang masih tetap aktif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data yang akan di analisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tehnik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dimana informan ditentukan ats pertimbangan tertentu (Patton, 1990). Informan tersebut antara lain : Ketua Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, Bendahara Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, Ketua Kelompok Aling-Aling, Bendahara Kelompok Aling-

Aling, dan satu perwakilan masyarakat yang mengerti atas permasalahan dalam penelitian ini. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Keuangan Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar

Setiap organisasi baik organisasi formal maupun informal pastinya memiliki pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik harus dapat diwujudkan dengan membuat laporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebuah organisasi yang dilakukan oleh pengurus organisasi merupakan sebuah bentuk tanggung jawab kepada anggotanya. Dewi (2015) menyatakan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan responsibility dari pihak yang mengelola terhadap pihak yang memberikan amanat. Hal tersebut juga berlaku pada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar. Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar sebagai sebuah organisasi sektor publik membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban agar dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar merekap transaksi setiap hari dan membuat laporan keuangan setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik dan tertata yang kemudian dilaporkan tiap tahun kepada desa. Seperti yang disampaikan oleh Bendahara Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar yaitu, Gede Panca Mahendra mengatakan :

“Iya tentu itu dik. Apalagi kami Kelompok Sadar Wisata harus membuat LPJ yang disampaikan kepada desa. Seperti yang adik lihat itu laporannya dik. Kalau perbulannya saya buat juga dik nanti di bulan desember kira-kira akhir tahun saya rekap semuanya dik. Jadi satu nanti baru dilaporkan di rapat lpjnya dik. Setiap bulan itu rutin saya buat biar tertata rapi dik. kalau yang dibuku yang adik liat isi penjualan itu tidap hari saya rekap dik, karena transaksi dalam satu hari banyak sekali dik apalagi tamunya ramai. Untuk rekapannya saya buat di *excel* dik. seperti

yang adik lihat dilaptop saya ini. awalnya saya catat dibuku kemudian saya pindahkan ke *excel*. Supaya meminimalkan kesalahan penjumlahan juga dik, apalagi jumlah uangnya banyak. Seperti yang dik sudah liat, yang tugas di *counter* itu catat tamu yang beraktivitas nanti saya yang rekap begitu *counter* sudah tutup dik.”

Hal tersebut dipertegas oleh ketua Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, Dedi Sastra Wirawan, berikut :

“Tentu saja. Saya selalu ingatkan pada bendahara untuk mencatat dan harus ada buktinya, dicatat di buku besar. Kami buat sendiri secara rinci berapa tamu masuk, asing maupun lokal....”

Hal tersebut juga dipertegas lagi oleh Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, Ketut Arya Sudarsana, berikut :

“Iya dik, setiap hari dia buat pencatatanya direkap pemasukan tiketnya. Nanti baru dikalkulasikan perbulan. Untuk LPJ-nya juga begitu nanti rekapan perbulan dikalkulasikan. Kalau untuk pencatatan awal itu dilakukan saat di TIC yang mencatat tamu dan memberikan tiket.”

Dari kutipan wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Bendahara Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar melakukan pencatatan secara manual dan merekap pemasukan tiket penjualan setiap harinya. Bendahara Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar juga melakukan pencatatan ke aplikasi *excel* untuk proses rekapitulasi laporan perbulan. Proses pencatatan pertama dilakukan oleh anggota Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar yang bertugas menjadi penjaga *counter* dan menerima tamu sesuai dengan jadwal giliran. Penjaga *counter* akan mencatat tamu yang datang berkunjung serta memberikan tiket masuk dan memberikan kuitansi untuk yang melakukan aktivitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar Ketut Arya Sudarsana, adapun proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata adalah pertama bendahara membuat laporan rekapitulasi pendapatan tiket masuk untuk kunjungan dan aktivitas selama satu bulan, jumlah kontribusi hasil pendapatan kepada Kelompok Aling-Aling selama satu

bulan, pengeluaran selama satu bulan, kas Kelompok Sadar Wisata, dan kontribusi sebesar 10% kepada Desa Dinas Sambangan, Desa Adat Sambangan, Banjar Dinar Banjar Anyar, dan Subak selama satu bulan. Biasanya jadwal pelaksanaan rapat bersama yang dilaksanakan oleh Kelompok Sadar Wisata dengan pengurus Kelompok Sadar Wisata, pengurus Kelompok Aling-Aling, Bapak Kades atau yang mewakili, Kelian Adat, dan Kelian Subak tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar rapat bersama selain rapat tahunan dilaksanakan 1 bulan atau 3 bulan sekali tergantung ada tidaknya kegiatan yang akan dilaksanakan dan harus dibahas, terutama untuk penyusunan RAB.

Peneliti menganalisis hasil observasi mengenai rapat intern yang sudah dilaksanakan pada tanggal 3 November 2018. Berdasarkan pengamatan peneliti pada rapat intern yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar bersama pihak desa dan Kelompok Aling-Aling pada tanggal 3 November 2018, Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar mengumumkan pemasukan atas penjualan tiket masuk kepada anggota Kelompok Sadar Wisata dan juga Kelompok Aling-Aling pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Dalam rapat tersebut juga membahas mengenai Penyampaian RAB yang telah direalisasikan, Penyampaian penggunaan dana proposal dari pemerintah, jumlah pembagian hasil dan kontribusi kepada pihak desa, dan RAB untuk pelaksanaan piodalan di air terjun Aling-Aling yang telah disepakati bersama untuk bulan Desember, serta membahas mengenai RAB untuk pembuatan sling di obek wisata air terjun Aling-Aling yang rencananya dibuatkan proposal yang akan ditujukan kepada desa. Sebelum rapat diakhiri disampaikan kesimpulan hasil Program Kerja, RAB, dan Proposal yang telah disusun dan disepakati bersama. Rapat tersebut tidak rutin dilakukan mengingat kegiatan yang akan mereka laksanakan tidaklah rutin dilakukan, seperti piodalan yang akan dilaksanakan di air terjun Aling-Aling.

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2010:17-18). Atmadja, dkk (2013:19) juga mengatakan, transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pengelolaan keuangan pada suatu organisasi atau kelompok harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik pihak eksternal dan internal. Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar juga mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan melalui rapat pertanggungjawaban yang dilakukan setiap tahun. Selain itu, rapat secara interen juga rutin dilakukan setiap satu atau 3 bulan sekali.

Hal tersebut dinyatakan oleh ketua Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, yaitu Dedi Sastra Wirawan, berikut :

“Proses pertanggungjawabannya kami lakukan pertama membuat laporan di Darwis. Kemudian direkap tiap bulan biasanya kami melakukan pertanggungjawaban kepada desa melalui musyawarah desa yang biasanya pertanggungjawaban kami lakukan tiap tahun di awal bulan Januari dik. Jadi kami disini terbuka dik, agar tidak ada ditutupi....”

Hal tersebut juga dipertegas oleh bendahara Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar, yaitu, Gede Panca Mahendra, mengatakan :

“Kalo proses pertanggungjawabannya, di akhir tahun atau di awal bulan Januari dik dilakukan rapat atau musyawarah bersama. Jadi nanti hadir disana pak kades atau yang mewakili, penasehat Kelompok Sadar Wisata Bapak Maharba, terus kami undang juga Kelian Adat yang berkenan hadir, Kelian Subak, dari perwakilan Dinas Pariwisata, Kelompok Aling-Aling juga dik. Tetapi kadang tidak semua bisa hadir karena kesibukan masing-masing dik.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Made Maharba Wibawa salah

satu perwakilan masyarakat dan juga Ketua BPD Desa Sambangan, sebagai berikut :

“Kebetulan karena tiang anggota BPD dan saat rapat pertanggungjawaban hadir, sedikit tidaknya tiang tahu dik. Seperti rapat pada umumnya, mereka mengundang bapak Kades atau yang mewakili, kemudian anggota darwis, dan juga kelompok dibawahnya seperti Aling-Aling, anak-anak muda yang menjadi guide juga dik, Kelian Adat dan juga Subak. Musyawarahlah istilahnya nike dik. Nanti disana dibuka oleh bapak Kades atau yang mewakili, kemudian ada penyampaian laporan dari darwis nike dik.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua kelompok Aling-Aling, Bapak I Made Sutama, berikut :

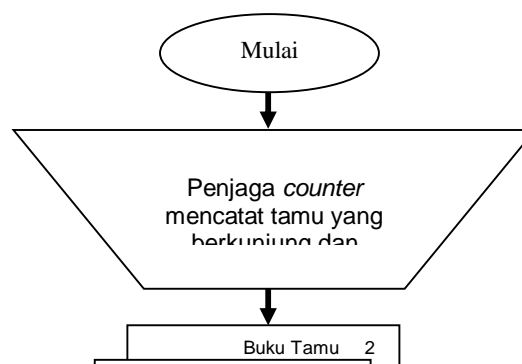
“Pernah dik. Tetapi semua memiliki kesibukan dik. saya nggih dik kebetulan pagi wenten ke abian. Kalau tidak baru bisa hadir. Kalau yang tahun 2017 dateng tiang dik.”

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Ketut Suarsa selaku Bendahara kelompok Aling-Aling, berikut :

“Pernah nike dik. Tapi kami karena kesibukan dan lainnya mungkin tidak bisa hadir. Kalaupun rapat juga pasti alot, jadi tiang males menghadiri dik.”

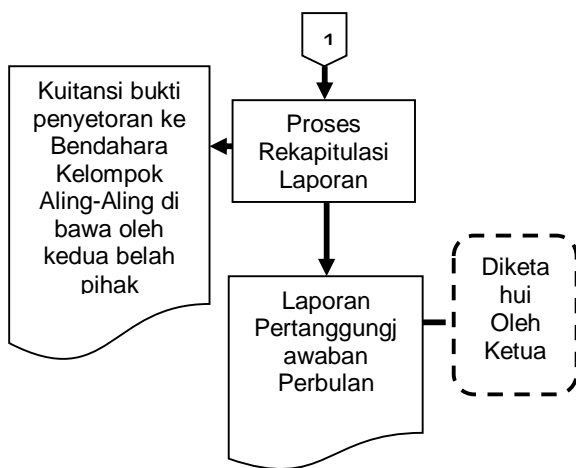
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelompok Sadar Wisata telah melaksanakan rapat LPJ tahun 2017 dengan mengundang pihak kelompok Aling-Aling untuk menunjukkan sikap transparansi dan akuntabilitas sebagai sebuah organisasi, namun tidak semua anggota kelompok bisa menghadiri rapat tersebut. Hal itu disebabkan oleh kesibukkan anggota di luar organisasi dan juga rapat pertanggungjawaban yang dinilai alot.

Berikut ini bagan yang dapat peneliti buat untuk dapat menggambarkan bagaimana proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar :



Gambar 4.12 Proses Pertanggungjawaban Kelompok Sadar Wisata
(Sumber Data : Hasil Wawancara dan Observasi, 2018)

Gambar 4.12 Proses Pertanggungjawaban Kelompok Sadar Wisata
(Sumber Data : Hasil Wawancara dan Observasi, 2018)



**Gambar 4.13 Proses
Pertanggungjawaban Kelompok Sadar
Wisata kepada Desa**

(Sumber Data : Hasil Wawancara dan
Observasi, 2018)

**Alasan Tidak Melaporkan Pengelolaan
Keuangan**

Seperti observasi yang peneliti lakukan di awal, terdapat beberapa alasan kelompok di bawah naungan Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar tidak melaporkan pengelolaan keuangannya kepada Kelompok Sadar Wisata. Adapun alasan yang dimaksud adalah Kelompok Aling-Aling tidak memiliki niat untuk membuat pengelolaan keuangan. Niat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti (1) Maksud atau tujuan suatu perbuatan, (2) Kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu. Niat yang ada pada individu dipengaruhi oleh motivasi untuk melakukan hal tersebut atau tidak, kecenderungan menilai apakah yang dilakukan memberikan manfaat atau tidak, serta mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku yang didasarkan atas pengalaman individu. Dalam Theory Plan of Behavior (TPB) yang dicetuskan oleh Icek Ajzen (1985) (dalam Yoga, 2018), niat seseorang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku.

Sikap terhadap perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana Kelompok Aling-Aling beranggapan bahwa pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel kepada Kelompok Sadar Wisata tidak memberikan manfaat yang berarti bagi mereka. Ketua Kelompok Aling-Aling mengatakan bahwa beliau mempercayakan sepenuhnya pengelolaan keuangan pada Bendahara, sehingga walaupun tidak dilaporkan pada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar tidak menjadi masalah, karena yang terpenting pengelolaan keuangan dalam Kelompok Aling-Aling sudah disampaikan secara intern dalam kelompok tersebut.

Bendahara Kelompok Aling-Aling juga mengatakan bahwa alasan lain tidak dibuatnya laporan keuangan oleh Kelompok Aling-Aling adalah jumlah transaksi yang sedikit. Jumlah transaksi yang sedikit menjadi alasan yang kuat mengapa mereka tidak mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan. Kelompok Aling-Aling beranggapan membuat laporan keuangan seperti Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar tidak memberikan manfaat bagi mereka, karena transaksi yang tidak rutin terjadi. Bendahara Kelompok Aling-Aling hanya melakukan pencatatan yang sederhana dengan mencatat jumlah pendapatan yang diperoleh dari Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan mencatat jumlah pengeluaran Kelompok Aling-Aling. Pencatatan baru dilakukan ketika pada rapat intern dilaksanakan.

Kelompok Darwis Tunjung Mekar tidak terlalu menuntut pelaporan keuangan dari Kelompok Aling-Aling. Hal tersebut disebabkan karena adanya sikap sungkan dan menganggap Kelompok Aling-Aling adalah kelompok senior, sehingga mereka cenderung untuk menghormati keputusan yang dibuat Kelompok Aling-Aling.

Selain itu, dalam Kelompok Aling-Aling sendiri terutama yang memegang jabatan ketua tidak mengharuskan pengelolaan keuangan pada Kelompok Aling-Aling untuk dilaporkan kepada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan hanya perlu dilaporkan dalam Kelompok Aling-Aling saja.

Selain itu, dalam Kelompok Aling-Aling sendiri terutama yang memegang jabatan ketua tidak mengharuskan pengelolaan keuangan pada Kelompok Aling-Aling untuk dilaporkan kepada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan

hanya perlu dilaporkan dalam Kelompok Aling-Aling saja. Berikut ini kutipan wawancara dari ketua Kelompok Aling-Aling bapak I Made Utama, yaitu :

“Inggih dik. Tapi hanya diKelompok Aling-Aling manten. Hanya intern kelompok saja nike. Tidak ke darwis. Buat apa kami buat laporan seperti itu ke Darwis, yang penting kami di kelompok sudah saling terbuka, dan saling percaya.”

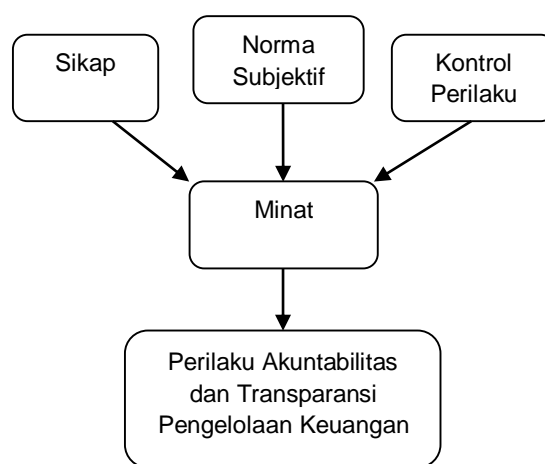
Hal tersebut juga dipertegas oleh Bendahara Kelompok Aling-Aling, yaitu Bapak Ketut Suarsa, mengatakan :

“Inggih dik. Kalau di Kelompok Aling-Aling sendiri terbuka dik. Kami semua percaya dan terbuka kalau masalah keuangan dik. Kalau di Kelompok Sadar Wisata dik tiang jujur terus terang tidak tahu menahu dik. Karena tiang tidak mengurus masalah keuangan darwis. Selain nike juga, dari pak ketua dan kami sepakat tidak melaporkan pengelolaan kepada darwis. Hanya intern.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan individu yang tidak mendukung atau menuntut adanya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdampak pada kurangnya keyakinan atau niat untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Lingkungan dapat mendorong individu untuk memiliki niat dalam melakukan suatu perilaku. Dalam hal ini pengaruh motivasi atau dorongan dari orang lain akan mempengaruhi perilaku yang menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas peneglolaan keuangan. Lingkungan individu yang tidak mendukung atau menuntut adanya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdampak pada kurangnya keyakinan atau niat untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kontrol perilaku mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi. Latar belakang pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel mengakibatkan mudah atau tidaknya dalam melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Latar belakang pendidikan Bendahara dari Kelompok Aling-Aling yang merupakan bukan dari kalangan akuntan sehingga tidak begitu menguasai bagaimana melakukan pencatatan yang akuntabel juga menjadi salah satu penghalang terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.



Gambar Hubungan *Theory Plan of Behaviour* pada Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
(Sumber Data : Diolah, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar sudah memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk sebuah organisasi. Ini menjadi bukti bahwa Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar memiliki kesadaran bahwa perlu adanya peningkatan kemampuan dari segi sumber daya manusia untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan partisipasi dari Kelompok Aling-Aling. Berdasarkan hasil wawancara, banyak anggota Kelompok Aling-Aling yang tidak bisa menghadiri pelatihan disebabkan kesibukan masing-masing anggota. Kurangnya pengetahuan mereka menghalangi niat mereka untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemahaman Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan

Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan Kelompok Aling-Aling sebagai kelompok yang bernaung dibawah Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam sebuah organisasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat Desa Sambangan atas pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Sambangan. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Made Maharba Wibawa salah satu perwakilan masyarakat dan juga Ketua BPD Desa Sambangan, yaitu :

“Sudah jelas pasti dik, karena masalahnya kepercayaan dik. Kalau tidak akuntabel nanti masyarakat curiga dananya dipakai, tapi tidak ada catatannya. Kalaupun sederhana saya rasa tidak masalah, yang penting ada dik. Kalau tidak transparan antara anggota saja bisa ribut apalagi dengan masyarakat dik. Jadi keduanya harus balance ya dik, pendapat saya begitu.”

Dari kutipan wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa selaku masyarakat desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sangat penting. Apabila bukti pencatatan transaksi tidak dimiliki baik oleh Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan Kelompok Aling-Aling maka berdampak pada timbulnya kecurigaan pada masyarakat atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan Kelompok Aling-Aling. Meskipun begitu, hal tersebut tidak dibarengi dengan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Kelompok Aling-Aling kepada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dapat dikatakan transparan dan akuntabel. Adapun alasan tidak dibuatnya laporan keuangan oleh yang berada dibawah Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar yaitu, Kelompok Aling-Aling

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dikenal dengan istilah teori perilaku terencana (*Theory Plan of Behaviour*). Ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi niat individu untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan perilaku transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar dan Kelompok Aling-Aling memiliki pemahaman bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sangatlah penting dalam menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat atas pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Sambangan. Meskipun begitu, hal tersebut tidak dibarengi dengan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Kelompok Aling-Aling kepada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar.

SARAN

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar adalah memberikan informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ke sosial media yang dimiliki oleh Pokdarwis Tunjung Mekar agar dapat diakses dan dijangkau oleh setiap anggota Pokdarwis Tunjung Mekar termasuk Kelompok Aling-Aling dan masyarakat Desa Sambangan dan sebaiknya menerapkan PSAK 45 sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan mengingat Kelompok Sadar Wisata adalah kelompok sosial atau nirlaba.

Selain itu dari segi pemerintah sebaiknya memberikan gambaran yang jelas mengenai laporan keuangan yang harus dibuat oleh kelompok sadar wisata agar laporan yang dibuat dapat seragam sehingga dapat dibandingkan dengan kelompok lainnya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menindaklanjuti apakah kelompok sadar wisata lainnya menerapkan pedoman PSAK 45 sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan dan juga dalam melaksanakan penelitian peneliti menemukan kendala dalam melaksanakan wawancara dimana keterbatasan waktu dalam melaksanakan wawancara secara mendalam, sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah

alokasi waktu wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak.

DAFTAR RUJUKAN

Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, No. 2, Hal: 179-211.

Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Dewi, Ni Ketut Juni Kalmi. 2015. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Tingkat Dadia (Studi Kasus Pada Dadia Punduh Sedahan Di Desa Pakraman Bila Bajang)*. Skripsi. Akuntansi Program S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Kementerian Pariwisata. 2012. *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Tersedia pada www.kemenpar.go.id. Diakses tanggal 30 September 2018.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.

Patton, M.Q. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage Publications.

Putra, I Putu Andi SuarJaya. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. Skripsi. Akuntansi Program S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha

Suastini, Luh Putu Eka Putri. 2019. *Analisis Penerapan Sanksi Sekala (Nyata) Terhadap Evaluasi Keberhasilan Pengendalian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada LPD Desa Sudaji)*. Skripsi. Akuntansi Program S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Yoga, I Made Riandika Dwi. 2018. *Pengaruh Moral, Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Pada Kecurangan Akademik*. Skripsi. Akuntansi Program S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha.